



**PUSAT STUDI ARSIP PEMBERANTASAN KORUPSI  
ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA**

JALAN BUNEIT NO. 26 PANCORAN JAKARTA SELATAN 12540  
www.arri.go.id

Dharwis W.U. Yacob

**PUSAT STUDI  
ARSIP PEMBERANTASAN KORUPSI  
ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA**

Indonesia memiliki banyak pengalaman menghadapi permasalahan korupsi. Dalam konteks sejarah perjalanan bangsa. Saat itu Indonesia masih bernama Hindia Belanda. Korupsi yang terjadi di tubuh VOC mengakibatkan perusahaan besar yang didukung penuh pemerintah Belanda itu tidak mampu mempertahankan eksistensinya dan akhirnya dinyatakan bangkrut. Pengalaman sejarah bangsa Indonesia terkait korupsi ini ternyata setelah kemerdekaan masih ditemui kembali pada masa Republik Indonesia, sehingga setelah 75 tahun Indonesia merdeka kasus tindak pidana korupsi terus-menerus

berulang. Cakupannya kian meluas, tidak hanya terjadi di lingkungan institusi pemerintah, tetapi juga di lingkungan institusi cabang-cabang kekuasaan negara lain baik di tingkat pusat dan daerah, perusahaan negara/daerah (BUMN/BUMD), dan partai politik dengan melibatkan kalangan dunia usaha/pengusaha.

Arsip dan peristiwa sejarah merupakan suatu yang tidak dapat dipisahkan dari memori bangsa. Arsip menjadi saksi bisu, tak terpisahkan, handal dan abadi, yang memberikan kesaksian terhadap keberhasilan, kegagalan, pertumbuhan, dan kejayaan bangsa. Arsip pemberantasan korupsi

merupakan rekaman informasi faktual yang dapat digunakan sebagai rujukan dan kepentingan akademis dalam penelitian dan pengembangan penegakan hukum pemberantasan korupsi di Indonesia. Arsip pemberantasan korupsi sebagai memori kolektif dan sumber pengetahuan arsip statis harus dikelola secara benar, sehingga dapat diakses dan dimanfaatkan oleh publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kaidah-kaidah kearsipan.

Saat ini, Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) dengan dukungan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)



Ruang Kajian Pusat Studi Arsip Pemberantasan Korupsi, Februari 2021

dan dengan dukungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) membangun unggulan berbentuk pusat studi kearsipan dengan materi arsip statis pemberantasan korupsi. Diresmikan pada 20 Desember 2020 dengan nama Pusat Studi Arsip Pemberantasan Korupsi atau disingkat dengan PSAPK ANRI. Pusat studi ini melaksanakan kegiatan studi, pelayanan, dan pemanfaatan

arsip pemberantasan korupsi yang berasal dari institusi penegak hukum di Indonesia dengan standar tertentu dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Materi arsip yang dikelola adalah arsip terkait pemberantasan korupsi yang kasusnya sudah memiliki kekuatan hukum tetap/inkracht dan memiliki nilai guna kesejarahan. PSAPK ANRI juga secara khusus mengembangkan studi kearsipan yang objek materinya

arsip statis pemberantasan korupsi, dengan menjalin hubungan kerja sama dengan institusi penegak hukum pemberantasan korupsi serta berbagai institusi lain yang terkait di dalam dan luar negeri, guna menghasilkan pelayanan kearsipan terbaik, khususnya pelayanan akses arsip pemberantasan korupsi.

Harapan berdirinya PSAPK ANRI antara lain mampu membangkitkan minat para pengguna arsip penegakan



Prasasti Peresmian Pusat Studi Arsip Pemberantasan Korupsi 20 Desember 2020



Kerja sama Pusat Studi Arsip Pemberantasan Korupsi ANRI dengan Pusat Studi Anti Korupsi dan Tindak Pidana Universitas Airlangga, 30 Maret 2021



Ruang Layanan Arsip Pusat Studi Arsip Pemberantasan Korupsi, Maret 2021

hukum bidang korupsi dari berbagai profesi, mempromosikan khazanah arsip statis ANRI sebagai memori kolektif bangsa, sumber pengetahuan, dan bahan penelitian pemberantasan korupsi. Oleh karena itu, PSAPK ANRI harus memiliki sarana akses yang lengkap baik manual dan elektronik serta tersaji dalam situs web ANRI.

Dikelola dengan profesional dan didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang andal agar dapat melahirkan program dan kegiatan dengan hasil yang berkualitas unggul.

Visi PSAPK ANRI adalah menjadikan Pusat Studi Arsip Pemberantasan Korupsi ANRI yang unggul pada 2025. Sedangkan

misi PSAPK ANRI adalah menyelenggarakan pelayanan arsip statis tindak pidana korupsi (tipikor) dari masa kolonial hingga kemerdekaan secara manual dan berbasis teknologi, informasi, dan komunikasi, menyelenggarakan pameran arsip penegakan hukum tipikor secara reguler dan temporer;



Ruang Pameran Pusat Studi Arsip Pemberantasan Korupsi, Februari 2021



Ruang Perpustakaan Pusat Studi Arsip Pemberantasan Korupsi, Februari 2021

menyelenggarakan kegiatan ilmiah kearsipan (seminar, lokakarya, *workshop*) terkait arsip penegakan hukum tipikor; menyelenggarakan kegiatan penelitian yang berstandar internasional; membangun jejaring nasional dan internasional untuk menyelamatkan, mengolah, melestarikan, dan menyajikan khazanah arsip statis ANRI, khususnya arsip penegakan hukum tipikor untuk kepentingan pemerintahan dan pelayanan publik; menyediakan referensi ilmiah kearsipan dan penegakan hukum tipikor untuk kepentingan penelitian dan peningkatan pelayanan publik.

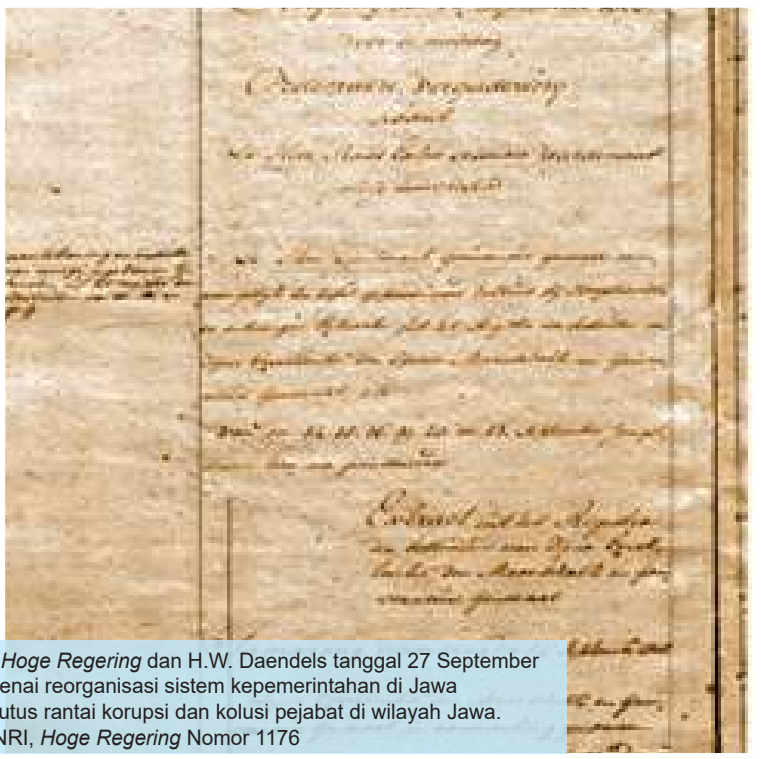
Sebagai contoh gambaran umum dari penyusunan target program dan strategi pencapaian PSAPK ANRI dapat ditempuh melalui lima tahapan. Tahapan ini mulai dari persiapan (2020-2021), perintisan (2021-2022), pengembangan (2022-

2023), internasionalisasi (2023-2024), hingga tahap menjadi Pusat Studi Arsip Pemberantasan Korupsi ANRI (2025) yang unggul sebagaimana dirumuskan dalam visinya.

Tahap Persiapan (2020-2021) adalah tersusunnya naskah akademik pendirian PSAPK ANRI, terpenuhinya dasar legalitas PSAPK ANRI, strukturisasi fungsi dan tugas pokok PSAPK ANRI, dan tersusunnya Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah (SOP AP) PSAPK ANRI. Tahap Perintisan (2022-2023) adalah tersedianya SDM yang memiliki kualifikasi keahlian yang memadai untuk ditugaskan di PSAPK ANRI (arsiparis, pranata komputer, sejarawan, kehumasan, pustakawan, peneliti, dll), tersedianya fasilitas prasarana dan sarana untuk administrasi, pelayanan arsip, pengolahan data, penyimpanan arsip hasil reproduksi, pameran,

seminar, penelitian, perpustakaan, area publik, digitalisasi arsip, terselenggaranya pameran kearsipan di bidang pemberantasan korupsi, terselenggaranya pertemuan ilmiah (seminar, lokakarya, *workshop*) di bidang kearsipan dan penegakan hukum tipikor.

Tahap Pengembangan (2023-2024) adalah meningkatnya ketersediaan SDM (kuantitas dan kualitas) yang memiliki keahlian memadai untuk ditugaskan di PSAPK ANRI, meningkatnya penyelenggaraan pameran arsip penegakan hukum tipikor, meningkatnya pertemuan ilmiah (seminar, lokakarya, *workshop*) di bidang kearsipan dan penegakan hukum tipikor, terbentuknya jejaring kelembagaan dengan pencipta arsip dan lembaga kearsipan dalam negeri, tersedianya sarana akses arsip penegakan hukum baik manual dan elektronik, digitalisasi dan layanan



Keputusan *Hoge Regering* dan H.W. Daendels tanggal 27 September 1808 mengenai reorganisasi sistem pemerintahan di Jawa untuk memutus rantai korupsi dan kolusi pejabat di wilayah Jawa. Sumber: ANRI, *Hoge Regering* Nomor 1176



Artikel yang ditulis J. F. Dijkstra (seorang pemilih perkebunan berkebangsaan Belanda) yang berjudul "De Corruptie in de Nederlandsch-Indische Ambtenaarswereld of Mr. Remrevalsregeerings-commissaris door J. F. Dijkstra, Planter" (Korupsi yang dilakukan oleh Pegawai Pemerintah Hindia-Belanda, Mr. Rhemrev, Menjabat sebagai Komisioner Pemerintah, ditulis oleh J. F. Dijkstra) merupakan kasus korupsi pertama yang diekspose kepada publik melalui pers. Sumber: ANRI, Inventaris Arsip *Algemene Secretarie Seri Grote Bundel Besluit* Nomor 1337 (1)

daring arsip penegakan hukum tipikor, dan publikasi hasil penelitian/naskah sumber di bidang kearsipan dan penegakan hukum tipikor.

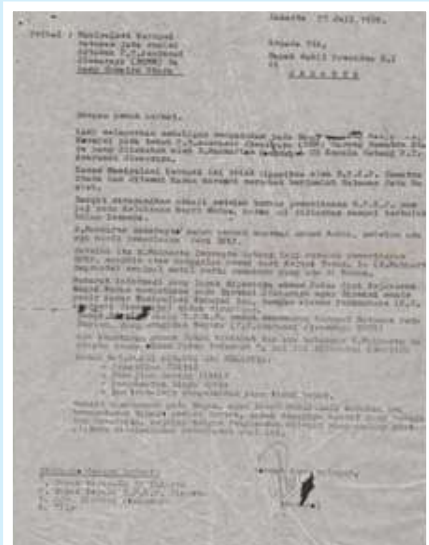
Tahap Internasionalisasi (2024-2025) adalah ketersediaan SDM (kuantitas dan kualitas) yang memiliki keahlian berkualifikasi internasional untuk ditugaskan di PSAPK ANRI, tersedianya prasarana dan sarana untuk administrasi, pelayanan arsip, pengolahan data, penyimpanan arsip hasil reproduksi, pameran, seminar, penelitian, perpustakaan, area publik (*public area*) manual dan elektronik yang berkualifikasi internasional, meningkatnya ketersediaan sarana akses arsip penegakan hukum tipikor baik manual dan elektronik yang berkualifikasi internasional, terselenggaranya penyelenggaraan

pameran arsip penegakan hukum tipikor yang berkualifikasi internasional, terselenggaranya pertemuan ilmiah (seminar, lokakarya, workshop) terkait arsip penegakan hukum tipikor yang berkualifikasi internasional, meningkatnya publikasi hasil penelitian/naskah sumber di bidang kearsipan dan penegakan hukum tipikor yang berkualifikasi internasional.

Tahap PSPAK ANRI Unggul (2025) adalah meningkatnya ketersediaan SDM (kuantitas dan kualitas) yang unggul untuk ditugaskan di PSAPK ANRI, meningkatnya ketersediaan prasarana dan sarana untuk administrasi, pelayanan arsip, pengolahan data, penyimpanan arsip hasil reproduksi, pameran, seminar, penelitian, perpustakaan,

area publik (*public area*) manual dan elektronik yang unggul, meningkatnya penyelenggaraan pameran arsip penegakan hukum tipikor yang unggul, meningkatnya penyelenggaraan pertemuan ilmiah (seminar, lokakarya, *workshop*) terkait kearsipan dan penegakan hukum yang unggul, meningkatnya publikasi hasil penelitian/penerbitan naskah sumber kolaborasi internasional di bidang kearsipan dan penegakan hukum tipikor yang unggul.

Adapun khazanah arsip statis pemberantasan korupsi pada era VOC (1609-1799) adalah khazanah arsip statis *Hoge Regering* (Dewan Tertinggi zaman VOC), *Notariaat* (Notaris zaman VOC), dan *Residentie* (Arsip Daerah zaman VOC). Khazanah arsip statis mengenai



Korupsi Yang terjadi di PT Asuransi Jiwasraya Tahun 1989  
Sumber: ANRI, Sekretariat Negara RI : Sekretariat Wakil Presiden (1967) 1969 – 1999 Nomor 730

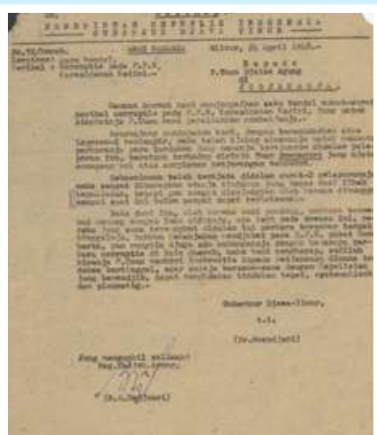


Dugaan Korupsi yang dilakukan oleh Bupati Tapanuli Tengah Tahun 1989. Sumber: ANRI, Inventaris Sekretariat Negara RI: Sekretariat Wakil Presiden (1967) 1969–1999 Nomor 727

pemberantasan korupsi pada era Hindia Belanda (1816-1942) adalah khazanah arsip statis *Algemene Secretarie* (Sekretariat Negara Zaman Hindia Belanda, *Burgelijke Openbare Werken* (Departemen Pekerjaan Umum Zaman Hindia Belanda), *Verkeer en Waterstaat* (Irigasi dan Pengairan Zaman Hindia Belanda), *Mijnwezen* (Dinas Pertambangan zaman Hindia Belanda), *Financien* (Departemen Keuangan zaman Hindia Belanda), dan *Binnenlandsch*

*Bestuur* (Kementerian Dalam Negeri zaman Hindia Belanda). Khazanah arsip statis mengenai pemberantasan korupsi pada era Republik Indonesia (1945-sekarang) adalah khazanah arsip Badan Pengawas Kegiatan Aparatur Negara (Bapekan) 1959-1963, Departemen Pertahanan, Kabinet Presiden RI, Kabinet Perdana Menteri, Kementerian Pekerjaan Umum, Sekretariat Negara seri Tromol Pos, Telkom, Sekretariat Negara Seri Produk Hukum.

PSAPKANRI memiliki nilai strategis bagi ANRI dan penyelenggaraan kearsipan di Indonesia ke depan. Oleh karena itu, PSAPK ANRI harus terus dikembangkan secara matang, komprehensif, terpadu sesuai dengan target strategis yang telah ditetapkan sehingga mampu menjawab kebutuhan para penegak hukum dalam bidang pemberantasan korupsi pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.



Korupsi yang dilakukan oleh Pejabat di Karesidenan Kediri Tahun 1948. Sumber: ANRI, Inventaris Kepolisian Negara Nomor 2028



Laporan Pengaduan masyarakat melalui Tromol Pos 5000 tentang korupsi atau pungli yang telah diolah atau ditindaklanjuti  
Sumber: ANRI, Inventaris Arsip Sekretariat Negara RI: Sekretariat Wakil Presiden (1967) 1969–1999 Nomor 763



Laporan Pengaduan masyarakat melalui Tromol Pos 5000 tentang korupsi atau pungli yang telah diolah atau ditindaklanjuti. Sumber: ANRI, Inventaris Arsip Sekretariat Negara RI: Sekretariat Wakil Presiden (1967) 1969–1999 Nomor 763